

DAFTAR ISI

Halaman Judul	i
Halaman Pengesahan	iii
Kata Pengantar	iv
Daftar Isi	vi
Daftar Tabel	ix
Daftar Gambar	x
Daftar Lampiran	xi
Abstract	xii
Intisari	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Perumusan Masalah	6
1.3. Tujuan Penelitian	6
1.4. Manfaat Penelitian	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	8
2.1. Konsep Dasar Otonomi Daerah	8
2.1.1. Beberapa Pengertian Dasar	8
2.1.2. Arti Penting Desentralisasi	10
2.2. Otonomi Daerah di Indonesia	12
2.2.1. Pengertian Otonomi Daerah	12
2.2.2. Prinsip-Prinsip Otonomi Daerah	14
2.2.3. Perimbangan Keuangan	15
2.3. Konsep Dasar Pengelolaan Sumberdaya Hutan	17
2.3.1. Karakteristik Sumberdaya Hutan	17
2.3.2. Pengelolaan Hutan Lestari	19
2.3.3. Pengelolaan Sumberdaya Hutan Berbasis Masyarakat.....	23
2.4. Otonomi Daerah di Sektor Kehutanan	25
2.4.1. Dasar Hukum	25
2.4.2. Arti Penting Desentralisasi Pengelolaan Sumberdaya Hutan	26
2.4.3. Prasyarat Otonomi Daerah di Sektor Kehutanan	27
2.4.4. Faktor-faktor Penentu Keberhasilan	29
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	33
3.1. Metode Dasar	33
3.2. Pelaksanaan Penelitian	33
3.2.1. Lokasi dan Waktu Penelitian	33
3.2.2. Jenis dan Cara Pengambilan Data	33
3.3. Metode Analisis	37
3.3.1. Analisis Persepsi	37
3.3.2. Analisis Kebijakan	39

3.3.3. Analisis Data	41
BAB IV GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN	43
4.1. Letak Geografis dan Luas Wilayah	43
4.2. Kondisi Iklim	44
4.3. Kondisi Tanah dan Topografi	45
4.4. Kondisi Hidrologi	47
4.5. Daerah Aliran Sungai	47
4.6. Kondisi Hutan.....	48
4.6.1. Kondisi Hutan Negara	48
4.6.2. Kondisi Hutan Rakyat	50
4.3. Kondisi Sosial Ekonomi	52
4.3.1. Demografi	52
4.3.2. Struktur Perekonomian	53
4.3.3. Pemerintahan	54
BAB V HASIL PENELITIAN	58
5.1. Persepsi	58
5.1.1. Pengelolaan Hutan Negara oleh Perum Perhutani	58
5.1.2. Pengelolaan Hutan Negara di Era Otonomi Daerah	67
5.2. Program Aksi	95
5.2.1. Identifikasi Kewenangan Pemerintah Daerah	95
5.2.2. Restrukturisasi Kelembagaan Dinas Perhutanan dan Konservasi Tanah	96
5.2.3. Padu Serasi Antara Tata Guna Hutan dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten	97
5.2.4. Pembentukan Forum Komunikasi Penanganan Penjarahan dan Penataan Hutan	100
5.2.5. Pemberlakuan Jedah Lingkungan	101
5.2.6. Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Kehutanan	102
5.2.7. Memperkuat Wacana dan Pembentukan Jaringan	104
5.2.8. Penyusunan <i>Position Paper</i>	108
BAB VI PEMBAHASAN	110
6.1. Kondisi Hutan Wonosobo Menjelang Otonomi	110
6.2. Desentralisasi Pengelolaan Sumberdaya Hutan	114
6.2.1. Prioritas Pengelolaan	115
6.2.2. Peran Serta Masyarakat	116
6.2.3. Kontribusi Pendapatan	123
6.2.4. Penataan Kawasan	127
6.2.5. Bentuk Kelembagaan	130
6.2.6. Kewenangan	135
6.3. Kecenderungan Arah Pengelolaan Sumberdaya Hutan di Kabupaten Wonosobo pada Era Otonomi Daerah	140



UNIVERSITAS
GADJAH MADA

**PERSEPSI PEMERINTAH DAERAH TERHADAP DESENTRALISASI PENGELOLAAN SUMBERDAYA
HUTAN DALAM RANGKA OTONOMI
DAERAH (Studi Kasus di Kabupaten Wonosobo, Jawa Tengah)**

WIYONO, San Afri Awang

Universitas Gadjah Mada, 2001 | Diunduh dari <http://etd.repository.ugm.ac.id/>

BAB VII KESIMPULAN DAN SARAN	148
7.1. Kesimpulan.....	148
7.2. Saran.....	151
DAFTAR PUSTAKA	153
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1.	Kondisi hutan Indonesia tahun 2000	2
Tabel 2.1.	Perimbangan Keuangan	17
Tabel 4.1.	Luas Kabupaten Wonosobo menurut Kecamatan	44
Tabel 4.2.	Penggunaan Lahan di Kabupaten Wonosobo tahun 1999	46
Tabel 4.3.	Fluktuasi Hasil Hutan Negara di Kabupaten Wonosobo tahun 1995-2000	49
Tabel 4.4.	Fluktuasi Luas dan Potensi Hutan Rakyat di Kabupaten Wonosobo tahun 1996-2001	51
Tabel 4.5.	Luas Hutan Rakyat di Kabupaten Wonosobo pada Tahun 2001 Berdasarkan Sumber Dana dan Lokasi	51
Tabel 4.6.	Sebaran dan Kepadatan Penduduk Wonosobo pada tahun 2000	52
Tabel 4.7.	Produk Domestik Regional Bruto atas dasar Harga Konstan tahun 1999 ..	53
Tabel 4.8.	Jumlah Desa dan Kelurahan pada Setiap Kecamatan di Kabupaten Wonosobo	54
Tabel 5.1.	Persepsi Responden tentang Pengelolaan Hutan Negara Oleh Perum Perhutani	66
Tabel 5.2.	Persepsi Responden tentang Pengelolaan Hutan Negara di Era Otonomi Daerah	93
Tabel 5.3.	Luas Kawasan Hutan Negara di Kabupaten Wonosobo menurut beberapa Sumber	98
Tabel 5.4.	Usulan Luas Kawasan Hutan Negara Kabupaten Wonosobo Berdasarkan Pemanfaatannya	99

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1.	Hubungan Saling Ketergantungan antara Kebijakan Kehutanan dengan Sub Sistem Lain	40
Gambar 5.1.	Skenario Pengelolaan Sumberdaya Hutan Berbasis Masyarakat	103
Gambar 6.1.	Kecenderungan Arah pengelolaan Sumberdaya Hutan di Kabupaten Wonosobo	142
Gambar 6.2.	Konsep Pengelolaan Sumberdaya Hutan Berbasis Masyarakat Modifikasi	143

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 Panduan Wawancara (*interview guide*)
- Lampiran 2 Struktur Organisasi Sekretariat Daerah Kbpupaten Wonosobo Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo nomor 01 tahun 2001
- Lampiran 3 Macam-Macam Kewenangan Pemerintah Kabupaten Wonosobo di Bidang Kehutanan Berdasarkan Surat Keputusan Bupati Wonosobo nomor 27 tahun 2000
- Lampiran 4 Struktur Organisasi Dinas Kehutanan Kabupaten Wonosobo Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo nomor 02 tahun 2001
- Lampiran 5 Sebaran Penduduk Desa Hutan di Kabupaten Wonosobo
- Lampiran 6 Realisasi Pendapatan Kabupaten Wonosobo pada tahun 2000
- Lampiran 7 Nilai Ekspor Non Migas Kabupaten Wonosobo pada Tahun 1998-2000
- Lampiran 8 Pendapatan Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku dan Harga Konstan Pada Tahun 1999
- Lampiran 9 Volume Permohonan SKSHH di Kabupaten Wonosobo tahun 2000
- Lampiran 10 Peta Kawasan Hutan Kabupaten Wonosobo
- Lampiran 11 Rencana Tarif Permohonan SKSHH
- Lampiran 12 Peta Kawasan Hutan Kabupaten Wonosobo